

Pendidikan Politik dan Kesadaran Demokrasi di Era Reformasi: Sebuah Tinjauan Kritis

Khairunnisa Sirait¹, Reno Fernandes^{2*}, Suryanef Suryanef³

Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: renofernandes@fis.unp.ac.id

Abstrak

Era reformasi membawa dinamika pada kebebasan berpendapat dan berpolitik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis dan mengevaluasi sejauh mana pendidikan politik berperan dalam membentuk kesadaran politik atau justru menghilangkan kesadaran demokrasi. Hasil yang ditemukan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi pendidikan politik yang bersumber pada kesadaran politik di masyarakat. Seperti: munculnya polarisasi politik disebabkan adanya penyebaran informasi hoaks, dan ujaran kebencian, kultur politik yang masih dipengaruhi KKN, politik identitas, dan akses dan kualitas pendidikan politik yang belum merata dimana kurikulum yang kurang integrative didalam mengembangkan partisipasi dan berpikir kritis. Hal ini tentunya, membawa pengaruh pada partisipasi dan apatisme politik pada masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan revitalisasi kembali pelaksanaan pendidikan dan penguatan kesadaran demokrasi di era reformasi, sehingga menghasilkan pendidikan politik yang efektif sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di masyarakat.

Kata Kunci: Dinamika Sosial; Era Reformasi; Kesadaran Demokrasi; Pendidikan Politik.

Abstract

The reform era brings dynamics to freedom of speech and politics. The purpose of this study is to critically examine and evaluate the extent to which political education plays a role in shaping political awareness or actually eliminating democratic awareness. The results found that there are challenges facing political education that stem from political awareness in society. Such as: the emergence of political polarization due to the spread of hoax information, and hate speech, political culture that is still influenced by KKN, identity politics, and uneven access and quality of political education where the curriculum is less integrative in developing participation and critical thinking. This, of course, has an influence on political participation and apathy in society. In this case, it is necessary to revitalize the implementation of education and strengthen democratic awareness in the reform era, so as to produce effective political education as an effort to increase democratic awareness in society.

Keywords: Democracy Awareness; Political Education; Reformation Era; Social Dynamics.

How to Cite: Sirait, K., Fernandes, R. & Suryanef, S. (2025). Pendidikan Politik dan Kesadaran Demokrasi Di Era Reformasi : Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1(4), 242-254.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Era reformasi merupakan transformasi politik yang signifikan sejak runtuhnya orde baru tahun 1998. Awal runtuhnya masa orde baru ini ditandai dengan banyaknya masalah-masalah yang terjadi di Negara Indonesia. Transformasi ini bukan hanya sekedar pergantian rezim, melainkan sebuah restrukturisasi fundamental dalam lanskap politik, hukum, ekonomi, sosial, bahkan pendidikan. Periode pemerintahan Soeharto selama 32 tahun (1966-1998) diwarnai berbagai gejolak seperti: korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dikalangan elit. Tatanan sosial dan hukum adanya pelanggaran HAM. Penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan terhadap para aktivis dan lawan politik menjadi bagian praktek kekuasaan yang otoriter. Pada perekonomian, Indonesia terperosok ke krisis moneter dan nilai rupiah terhadap dolar mengalami inflasi. Sementara pada sistem pendidikan politik periode ini cenderung bersifat indoktrinatif dan pembentukan bangsa yang taat kepada pemerintah dan stabilitas politik (Manarfa, 2024).

Puncaknya pada Mei 1998, para demonstrasi dan masyarakat turun kejalan bersamaan dengan berbagai aksi yang dilakukan di berbagai kota. Berbagai tekanan yang kuat dari beragam kalangan masyarakat, menyebabkan presiden Soeharto menyatakan mundur dari kepemimpinannya pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa tersebut merupakan awal terjadinya perubahan ke reformasi yang dirasakan warga Negara Indonesia (Sumarto, 2022). Perubahan era reformasi ini membawa dinamika pada masyarakat terutama demokrasi dan partisipasi aktif dalam kemajuan Negara. Hak warga Negara dilindungi dan dijamin, dan kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers dijamin. Dalam hal ini, memberikan harapan akan konsolidasi demokrasi yang matang. Meskipun budaya masyarakat yang demokratis mulai tumbuh namun, pada implementasinya memiliki tantangan besar dalam membangun kesadaran demokrasi yang merata dan bersih (Sasbianto & Dkk, 2025). Misalnya pada pelaksanaan partai politik yaitu adanya kedaulatan penuh para oknum partai politik (*particrary*) menyebabkan pengendalian pada keputusan dan kebijakan yang dibentuk presiden maupun pemimpin daerah lainnya (Siti Nurhayati, 2023). Selain itu, kebebasan berpendapat yang mengandung unsur SARA dan ujaran kebencian menyebabkan konflik, dan sebagainya (Salampessy, 2024). Berbagai tantangan politik di era reformasi maka, awalnya adanya reformasi diharapkan mewujudkan demokrasi secara efektif dan adil malah sebaliknya sebagai pedang yang membawa berbagai tantangan dan masalah kepada negara. Dalam hal ini, diperlukan adanya kesadaran demokrasi di era reformasi saat ini. Untuk mewujudkan kesadaran demokrasi masyarakat yang dewasa, diperlukan

upaya sistematis dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan politik. Pendidikan politik hanya dipahami sebagai transfer pengetahuan bukan sebagai proses kritis yang membentuk dan kesadaran demokrasi secara mendalam di era reformasi saat ini secara kompleks dan tahan terhadap manipulasi politik. Dalam konteks inilah, artikel ini menawarkan pendidikan politik dan kesadaran demokrasi sebagai sebuah tinjauan kritis di era reformasi. Kajian ini tidak hanya melihat pendidikan politik sebagai perangkat teknis, tetapi sebagai arena ideologis yang sarat kepentingan. Dengan pendekatan kritis, artikel ini mengevaluasi bagaimana pendidikan politik di era reformasi membentuk atau justru membatasi kesadaran demokrasi warga Negara, serta sejauh mana ia berkontribusi terhadap penguatan demokrasi substantif, bukan sekedar prosedural.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut (Niam, 2024) penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan dan memahami makna yang terdapat pada fenomena secara alamiah. Sesuatu alamiah pada fenomena tidak hanya memberikan makna tersendiri, tetapi juga memberikan peluang tentang bagaimana kemungkinan untuk mendapatkan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi pada kehidupan manusia (Abdussamad, 2021).

Metode yang digunakan penelitian yaitu *studi literature* atau kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Kajian ini menekankan pada pandangan kritis terhadap penelitian yang telah dilakukan signifikan terhadap penelitian yang sedang diteliti. Telaah pustaka dijadikan sebagai pemberi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yang akan diteliti. Melalui proses mengidentifikasi, menilai, memilih, dan mensintesis secara sistematis sehingga terpilih referensi yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian serta menjawab hasil penelitian yang dilakukan peneliti (Fitrah. Muh&Lutfhiyah, 2017).

Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber-sumber relevan terkait pendidikan politik dan kesadaran demokrasi terhadap dinamika sosial di era reformasi saat ini pada buku, jurnal, dan lain sebagainya. Pembahasan dan hasil penelitian dijabarkan dalam berbentuk deskriptif tujuannya agar hasil penelitian dapat menggabarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, akurat, berdasarkan sumber-sumber penelitian yang dilakukan peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Politik dan Perkembangannya di Era Reformasi

Pendidikan politik merupakan proses pemberian ilmu mengenai politik berupa nilai, norma, symbol, dari politik pada suatu Negara. Seorang individu yang mempelajari pendidikan politik akan mempunyai wawasan politik yang luas (Riyanti, 2023). Pendidikan politik sebagai upaya yang dilakukan dalam penyampaian pengetahuan, wawasan, nilai dan keterampilan politik yang dilakukan oleh pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Melalui metode pendidikan dan media pendidikan tertentu dengan tujuan membentuk kepribadian politik individu sejalan dengan kultur politik masyarakat bangsa, melalui proses sepanjang hayat agar individu menyadari dirinya merupakan bagian dari masyarakat dan sistem politik, sehingga berpartisipasi aktif secara positif dan kesadaran demokrasi bagi bangsa dan Negara (Handoyono, 2017).

Era reformasi membawa adanya dinamika sosial, tentunya membawa pengaruh pada perubahan disektor pendidikan (Saptadi, 2024). Pendidikan di era reformasi mengubah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No. 22 Tahun 1999 menjadi sector pembangunan yang didesentralisasikan, pengembangan peserta didik lebih terfokus kepada pengelolaan masing-masing daerah (otonomi pendidikan)

Adanya revisi kurikulum nasional dan penyelenggaraan pendidikan yang lebih inklusif. Mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) tetap menjadi bagian integral dari kurikulum namun, dengan penekanan pada pemaparan yang lebih objektif dan dogmatis, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan pemikiran kritis dan kreatif. Reformasi pendidikan politik juga mencakup upaya peningkatan kualitas guru dan metode pembelajaran lebih interaktif (Saptadi, 2024)

Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi, begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah menjadi desentralistik. Pada masa ini, pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. kurikulum pendidikan di Indonesia selama era reformasi mengalami beberapa kali perubahan sebagai berikut: (1) Kurikulum berbasis kompetensi (KBK), yang terlahir pada tahun 2004 menepatkan siswa sebagai subjek dalam proses pendidikan, (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), terlahir pada tahun 2006. Penyusunan dan kewenangan mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, guru dituntut untuk mampu mengembangkannya dalam bentuk silabus dan penilaiannya disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerahnya. (3)

Kurikulum 2013 (K-13), sebagai penyempurnaan baru dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini lebih menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan serta keaktifan siswa. Siswa bisa mendapatkan pengalaman melalui observasi, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan informasi dalam pemelajaran. Hal ini menjadikan siswa menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapi. Didalam kurikulum ini juga mencakup pendidikan karakter dan budi pekerti yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran. (4) Kurikulum merdeka belajar (KMB), merupakan bentuk evaluasi dari kurikulum 2013. Kurikulum ini resmi diluncurkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pada Februari 2022 demi mengejar ketertinggalan pendidikan dimasa pandemic Covid -19. Kurikulum ini menciptakan pembelajaran menjadi lebih fleksibel (Kristian, 2023).

Selain ditingkat kurikulum, dinamika pendidikan politik di era reformasi tercermin dalam semangat pembaharuan institusi pendidikan tinggi. Terdapat upaya untuk memulihkan kemerdekaan akademis dan otonomi universitas. Pembebasan berpendapat, kebebasan akademis, dan kebebasan berserikat didalam kampus mendapat perhatian lebih dalam upaya menciptakan lingkungan akademis yang lebih dinamis dan responsive terhadap perubahan social dan politik. Semangat demokrasi dan hak asasi manusia menjadi tema di era reformasi saat itu (Saptadi, 2024). Keterlibatan pesantren di awal reformasi juga, sangat intens buka saja dalam segi kultural tetapi pada segi structural, sehingga muncul istilah “santri turun gunung”. Apalagi dengan naiknya presiden santri Abdurrahman Wahid, pesantren masuk dalam struktur Negara. Peran pesantren akan lebih terlihat ketika menjelang pemilu, dimana para tokoh nasional sering mengadakan silaturahmi ke pesantren-pesantren. Muatan politik terkesan adalah pencarian dukungan atau minimal mencari doa restu dari kalangan pesantren. Kondisi ini, penting untuk ditelusuri sejauh mana kontribusi pesantren dalam politik. Ditinjau dari segi kultural, pesantren memainkan peran politik untuk menanamkan nilai-nilai, diantaranya cinta tanah air, ketaatan pada pemimpin, nasionalisme, menjaga keutuhan Negara, musyawarah, menegakkan keadilan, dan hokum, menjaga stabilitas, dan kemauan untuk mengabdikan pada Negara. Dari segi structural, peran politik pesantren dimainkan oleh ulama pesantren dalam jajaran partai politik, menjadi anggota legislative, maupun eksekutif. Banyaknya ulama pesantren yang menjadi pesengurus partai atau anggota legislative (Tantowi, 2002).

Kesadaran Demokrasi di Era Reformasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani berartu *demos* yakni rakyat atau penduduk dan *cratein* yakni kekuasaan atau kedaulatan bagi pemerintah.

Sehingga, demokrasi merupakan kondisi suatu Negara yang berada pada kekuasaan atau pusat pemerintah yang berada ditangan rakyat. Demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara. Artinya, rakyat yang memberikan ketentuan dalam memberikan penilaian, dan keputusan-keputusan Negara, karena kebijakan pemerintah Negara tersebut tentunya akan menentukan kehidupan rakyat di masa yang akan datang (Parayitno, 2023).

Era reformasi ini ditandai dengan pemulihan demokrasi multipartai, perubahan konstitusi, pemelihan umum yang lebih terbuka, dan oeningkatan kebebasan sipil(Salampessy, 2024). Demokrasi tidak hanya dilihat dari bentuk pemerintahan, tetapi dijadikan sebagai sistem politik, dan sikap hidup yang mencakup nilai-nilai seperti partisipasi, kebebasan, kesetaraan, transparan, dan sebagainya (Hidayat, 2024). Menurut (Salampessy, 2024), demokrasi dimaknai secara normative yaitu perilaku demokrasi yang sesuai dilakukan Negara. Demokrasi juga dimakna sebagai empiris yaitu terkait penerapan demokrasi di dunia politik. Hal ini diatur pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa : kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Fungsi dan peran demokrasi sangat penting untuk menjalan sistem pemeruntahan yang adil, partisipatif, dan berkeadilan. Berikut merupakan fungsi dan peran demokrasi yaitu: (1) Mewujudkan kedaulatan rakyat, (2) Menjamin hak asasi manusia, (3) Mendorong akutabilitas pemerintah, (4) Memperkuat institusi-institusi demokratis, seperti: parlemen, partai politik, lembaha pendidikan, dan sebagainya (5) Mengatasi tantangan zaman, demokrasi abad 21 haru mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman yang sihnifikan. Seperti: globalisasi, penyebaran informasi, dan sebagainys(Salampessy, 2024).

Dalam hal ini, pendidikan politik dan kesadaran demokrasi merupakan dua hal yang saling terkait dan sangat penting untuk membangun masyarakat yang demokratis dan beradab, kesadaran demokrasi merupakan hasil dari pendidikan politik yang efektif, dimana individu dapat memahami dan menghargai nilai-nilai demokrasi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, partipasi politik, dan sebagainya.

Tinjauan Kritis Terhadap Realitas Politik Terhadap Pendidikan Politik Dan Kesadaran Demokrasi Di Era Reformasi

Pendidikan politik memiliki hubungan erat disuatu Negara, politik dijadikan sebagai media dalam menanamkan ideology Negara yang akan menopang kerangka politik. Menurut Plato hubungan antara adanya pendidikan dengan politik bersifat fundamental, ibarat mata sisi mata koin yang tidak mungkin terpisahkan. Pendidikan

politik dan kesadaran demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi dalam pembentukan masyarakat yang partisipatif dan demokratis. Pendidikan politik adalah fondasi yang menumbuhkan kesadaran demokrasi. Sementara kesadaran demokrasi adalah indikator keberhasilan pendidikan politik. Namun, fakta yang terjadi pada politik di Indonesia saat ini, sebenarnya sering kali tidak sejalan dengan tujuan pendidikan politik yang diharapkan. Meskipun pendidikan politik berupaya mengajarkan nilai-nilai demokrasi, pluralism, dan partisipasi aktif. Namun terdapat sejumlah tantangan dan ketidaksejajaran dalam praktik politik sehari-hari. Menurut (Salampessy, 2024), adanya kebebasan berpendapat dan pers dalam menimbulkan penyalahgunaan dalam penyebaran informasi hal ini memunculkan konflik. Salah satu penyebabnya adanya polarisasi akibat perbedaan politik menimbulkan produksi sirkulasi hoaks, *fake news*, dan ujaran kebencian menjadi sulit dikendalikan pada akhirnya dapat mengancam praktik politik yang demokratis sebagaimana cita bersama masyarakat. Hal ini akan menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi (Gunawan, 2021).

Kultur politik juga masih dipengaruhi nepotisme, korupsi, dan kolusi menjadi realitas menghambat perkembangan politik sehat. Pemilihan umum sering diwarnai adanya praktik politik yang tidak jujur, dan adil seperti *money politics* dan politik identitas (Saptadi, 2024). Dampaknya membawa menurunnya kualitas dan partisipasi politik masyarakat, hal ini ditambah dengan kurangnya pemahaman terhadap isu politik dan kejenuhan masyarakat pada proses demokratisasi yang belum sepenuhnya signifikan terhadap kualitas hidup warga Negara saat ini. Pada akhirnya mendorong munculnya sikap apatis politik (Rohim&Amika, 2019). Kepercayaan masyarakat terutama pada partai politik dinilai masyarakat hanya sebagai kepentingan sendiri dari pada kepentingan masyarakat yakni aksi dalam pergulatan untuk meraih kekuasaan (*struggle power*) ((Salampessy, 2024)

Mundurannya partisipasi masyarakat merupakan tantangan serius bagi negara didalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan hukum dan politik. Hal ini menimbulkan ketidakrepresentatifan dalam penetapan undang-undang atau kebijakan public, hal ini tentunya akan mengurangi legitimasi pemerintah dan melemahkan fondasi demokratis suatu Negara. Hal ini, juga akan menimbulkan adanya resiko adanya kesenjangan antara kebijakan yang diambil pemerintah dengan kebutuhan sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang dibuat tidak memenuhi harapan atau kepentingan masyarakat. Selain itu, akan menimbulkan peluang dalam

pembuatan keputusan politik secara diskriminatif dan penuh kepentingan masyarakat (Tarigan, 2024).

Saat ini, maraknya politik identitas, dimana..adanya proses demokrasi didalam kegiatan pemilu yang dulakukan berdasarkan identitas calon bukan kepada program yang akan diusungkan (Ahmad, 2024). Hal ini sejalan dengan bahwa masyarakat akan dipengaruhi oleh ikatan dan pengaruh ekonomi. Seperi: agama, tempat tinggal, sosio ekonomi, dan sebagainya. Dampaknya, masyarakat akan memilih pemimpin berdasarkan pengaruh atau tekanan lingkungan bykan karena isu yang ditekankan dalam kampanye pemilu (Setiawan & Djafar, 2023). Hal ini, tentunya sangat merusak akan nilai-nilai demokrasi dan dan tidak sesuai dengan pendidikan politik yang ada.

Pada Akses dan kualitas pendidikan poltik yang belum merata, dimana kurikulum yang kurang integrative dalam mengembangkan partisipatif dan berpikir kritis. Kritik pendidikan politik yang dipaparkan oleh Illich dan Giroux bahwa sistem dan pendidikan pada dasarnya adalah kepentingan politis. Perubahan-perubahan kurikulum, perlu adanya kritisi secara sosial dan politis. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari tujuan dibentuknya kurikulum, bagaimana pengetahuan dibentuk, siapa yang diuntungkan. Mencermati relasi politik kekuasaan dalam praktik pendidikan tidak hanya berlangsung disekolah melainkan juga diluar sekolah yakni ditengah masyarakat(Ura & Sudirgo, 2022).

Revitalisasi Pendidikan Politik Dn Penguatan Kesadaran Demokrasi

Berbagai kesenjangan dan tantangan pada pendidikan politik di era reformasi dalam menjembatani pada kesadaran demokrasi yang subtansial. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi pendidikan politik agar lebih kontekstual, partisipatif, dan sebagai solusi dalam menjawab tantangan politik diera reformasi. Selain itu, penguatan kesadaran demokrasi tidak hanya dipahami secara teoritis tetapi juga dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari hari. Berbagai upaya yang dapat dilakukan didalam revitalisasi pendidikan dan politik dan kesadaran demokrasi. Menurut (Hidayat, 2024) kurikulum formal di sekolah, program pendidikan masyarakat, dan kampanye kesadaran demokrasi. Pada pemerintah dan organisasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempromosikan pendidikan politik dan penyadaran demokrasi, dan memastikan semua masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan pelatihan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Menurut (Handoyono, 2017), kegiatan pendidikan politik tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tetapi bertujuan membentuk orientasi politik

pada diri individu (Handyo & Lestari, 2017). Pembentukan karakter melalui sikap, keyakinan, watak, dan kepribadian setiap insan harus dilakukan (Prayugo & Prayitno, 2022). Pada pendidikan formal, upaya yang dapat dilakukan pendidikan politik dan penguatan kesadaran demokrasi di era reformasi yaitu:

Pembaharuan Kurikulum

Dalam hal ini kurikulum dirancang sedemikian rupa secara fleksibel bagi sekolah untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat tanpa harus kehilangan orientasi nasional dan nasional. Kurikulum harus menggariskan adanya mata pelajaran yang mengintegrasikan pendidikan politik dengan suasana demokratis dalam proses belajar mengajar dan akhirnya dapat menanamkan nilai-nilai demokratis pada peserta didik, sehingga dapat mengembangkan sikap, nilai moral, dan kecerdasan emosional selain kecerdasan kognitif yang diperoleh peserta didik (Musbikin, 2019). Pendidikan kewarganegaraan khususnya, merupakan mata pelajaran paling penting didalam memberikan pendidikan politik dan nilai-nilai demokrasi di dalamnya. Dengan memberikan pembentukan karakter yang demokratis, partisipasi, peduli, saling menghargai kepada peserta didik dalam proses pembelajaran (Ubaedillah&Abdul Rozak, 2013).

Pada Aspek Guru Dan Pembelajaran

Guru berperan aktif sebagai penanaman pendidikan politik, selain sebagai pendidik seorang guru menjadi fasilitator dan motivator, dengan memperkuat dan mendalami serta mendalami apa yang telah dipelajari dalam proses pendidikan. Pemberian materi bersifat *problem oriented*, dimana guru menyampaikan pembelajaran berangkat pada riel yang dihadapi dilingkungannya. Sehingga, materi bersifat teoritis dan relevan dengan kehidupan nyata siswa. (Musbikin, 2019). Hasilnya kegiatan pembelajaran menjadi bermakna, menumbuhkan keaktifan kepada peserta didik didalam dengan mampu memecahkan masalah atau pengambilan keputusan didalam pembelajaran. Adanya pengembangan pembelajaran dengan metode dan strategi seperti *cooperative learning* secara tidak langsung juga akan mengembangkan sikap-sikap demokratis peserta didik, dimana adanya untuk saling menghargai pendapat orang lain, bekerjasama, dan toleransi (Widodo & Nurholis, 2019)

Dalam hal ini, revitalisasi pendidikan politik dan kesadaran demokrasi sebagai upaya penataan ulang kembali agar implementasi dengan baik kepada siswa. Dikarenakan, pembelajaran yang dikaitkan dengan realitas politik dan kehidupan siswa akan membawa pembelajaran pada proses kolaboratif dan kontekstual, harapannya dapat mendukung kesadaran sikap demokrasi yang berkeadaban dengan cirinya yang

aktif, kritis, dan menjadi contributor sebagai pelaku dalam penyelesaian persoalan politik di era reformasi. Hal ini sejalan dengan teori (1) Praksis, aksi, dan perbuatan menuju pada sebuah perbaikan bagi strukturstruktur politik dan kemasyarakatan. Pada implementasi nilai praksis ini dapat dilakukan didalam kegiatan masyarakat baik individu maupun sebagai warga Negara. Misalnya, nilai praksis berupa sikap saling menghormati, praktik kejujuran, menjunjung tinggi nilai keadilan serta mengutamakan rasa kepedulian atau empati terhadap sekitar termasuk pada politik di lingkungannya (Sari, 2025). (2) Demokratisasi dalam segala bidang social ke masyarakatan dan kehidupan (Prayugo & Prayitno, 2022). (3) Pembangunan berpikir kritis terhadap permasalahan-masalah politik melalui kemampuan literasi Pengembangan kemampuan dan literasi politik, merupakan hal penting didalam pendidikan politik dan menumbuhkan kesadaran demokrasi. Literasi politik mencakup pemahaman tentang sistem politik, kemampuan dalam menganalisis isu-isu kebijakan publik secara kritis (UNDIP, 2025).

Pembangunan berpikir kritis terhadap masalah-masalah politik di era reformasi dapat ditingkatkan melalui kemampuan literasi politik masyarakat. Hal ini, menjadi penting dalam pendidikan politik dan menumbuhkan kesadaran demokrasi dimana masyarakat akan berpikir kritis dalam menanggapi dan menilai secara efektif terkait masalah politik yang muncul. Literasi politik ini tentunya memudahkan dalam kebebasan berpendapat dengan kritis (Ilmu, Politik, & Diponegoro, n.d.). dalam hal ini, Peran media masa. Diera teknologi informasi media masa tidak hanya sbagai penyampaian pesan, tetapi merupakan alat didalam memberikan pendidikan politik dan penguatan kesadaran demokrasi bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pelaksanaan tersebut secara efektif maka, diperlukan strategi komunikasi politik yang mampu beradaptasi pada dinamika perkembangan zaman. Perlu diperhatikan bahwa penyampaian pesan terkait pemberian pendidikan politik dan penguatan demokrasi tersebut harus mempertimbangkan bagaimana pesan politik akan diinterpretasikan dan disampaikan kepada masyarakat. Dengan mempertimbangkan informasi yang akurat, jelas, bertanggung jawab, dan beretika tanpa mengandung unsur-unsur konflik dan SARA. (Putranto, 2024). Hal ini sejalan dengan teori Agenda *Setting* dan *Framing* yang dipelopori oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw, bahwa untuk membentuk persepsi dan memusatkan perhatian masyarakat terhadap suatu informasi spesifik yang ditujukan, maka para kelompok tersebut memberikan informasi yang positif (Shilfa, dkk, 2025). Dalam hal ini, media sosial menjadi alat efektif untuk memberikan edukasi

politik, meningkatkan partisipasi politik, hingga sampai pada kesadaran akan nilai-nilai demokrasi di era reformasi yang digital saat ini.

Media masa, pemerintah, dan pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan nilai demokrasi yang baik agar kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggung jawab. Satu hal yang perlu ditekankan dalam pendidikan politik dan penguatan kesadaran demokrasi ini adalah adanya prinsip hidup tentang kemanusiaan. Selain itu, dalam menumbuhkan kesadaran demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, maka pemimpin perlu diperhatikan melalui pemilihan umum dengan melibatkan penuh aspirasi rakyat atau adanya legitimasi, musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat menentukan harapan bersama dengan menjaga harmoni dan stabilitas sosial politik (Salampessy, 2024).

Dalam hal pendidikan politik di era reformasi ini bukan hanya sekedar penyampaian teoritis, tetapi lebih menekankan pembentuk karakter dan tindakan aksi dan relasi dalam kehidupan berpolitik agar melahirkan kesadaran demokrasi yang positif dalam kemajuan bangsa dan Negara.

Kesimpulan

Era reformasi adalah era dimana masyarakat mengalami dinamika social, hal ini menimbulkan tantangan terutama pada perilaku demokrasi yang benar. Dalam hal ini, adanya pendidikan politik sangat penting untuk membentuk sikap warga Negara menjadi aktif, kritis, dalam menyikapi permasalahan yang ada serta mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kesadaran demokrasi yang baik demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sampel yang belum merepresentasikan pada heterogenitas masyarakat secara keseluruhan, dan focus pada analisis dokumen tanpa melihat langsung kepada objek penelitian atau partisipan yang dituju. Implikasi teoritis dari temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik yang terstruktur dapat menjadi variable mediasi dalam pembentukan kesadaran demokrasi, mendorong kolaborasi antar *stakeholder* dan lembaga pendidikan dalam upaya membenahi pendidikan politik di era saat ini, dan meningkatkan literasi politik dan partisipasi warga Negara melalui program-program pendidikan yang berkelanjutan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengadopsi penelitian kualitatif ataupun kuantitatif dengan metode studi kasus pada suatu wilayah tujuannya agar mendapatkan data yang lebih komprehensif terkait efektifitas pelaksanaan pendidikan politik, memberikan pemahaman mendalam terhadap sumbangan

pembangunan dan relevan dalam pengambilan kebijakan terhadap pendidikan politik yang diterapkan di era saat ini.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Pertama). Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Ahmad, I. (2024). *Politik Mililennial*. Sukabumi: CV Jejak.
- Fitrah. Muh&Lutfhiyah. (2017). *Metodologi Penelitian, Tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Pertama). Sukabumi: CV Jejak.
- Gunawan, B. & B. M. R. (2021). *Demokrasi Di Era Post Truth* (Pertama). Jakarta: Kepustaaan Populer Gramedia.
- Handoyono, E. L. (2017). *Pendidikan Politik* (Pertama). Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Hidayat, A. N. (2024). *Buku Ajar Analisis Publik* (Pertama). Jambi.
- Ilmu, F., Politik, I., & Diponegoro, U. (n.d.). *Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro*.
- Kristian, D. (2023). *Konsep dan Implementasi Pendidikan*. Makassar: Cendekia Publisher.
- Manarfa, L. O. et al. (2024). *Sejarah Nasional Indonesia* (pertama). Padang: CV. Gita Lentera.
- Musbikin, I. (2019). *Penguatan pendidikan Karakter (PPK) Referensi Pembelajaran untuk Guru dan Siswa SMAA/MA* (Pertama). Bandung: Nusa Media.
- Niam, M. F. dk. (2024). *metode penelitian kualitatif* (1st ed.). Bandung: Widina Media Utama.
- Parayitno, R. B. P. (2023). *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik* (Pertama). Yogyakarta: Deerpublish.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138>
- Putranto, A. (2024). *Komunikasi Politik* (Pertama). Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Riyanti, D. (2023). *Kebijakan Publik Berbasis Pendidikan Politik (Sebuah Upaya Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Pasar Tradisional)* (Pertama). bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

- Salampessy, M. (2024). *Dinamika Demokrasi Abad 21* (Pertama). Padang: CV. Gita Lentera.
- Saptadi, N. (2024). *Pendidikan Politik*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sari, V. dkk. (2025). *Pengantar Etika Politik*. CV. Gita Lentera.
- Sasbianto, T., & Dkk. (2025). *Insan Cita 2045* (Pertama). Sidorejo: PT. Nas Media Indonesia.
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877>
- Shilfa. dkk. (2025). *Public Relations: Membangun Citra Positif dan Meningkatkan Kepercayaan Publik* (Pertama, ed.). Yogyakarta: PT Green Pustaka Indonesia.
- Siti Nurhayati. (2023). Dinamika Perkembangan Demokrasi serta Problematikanya Pasca Reformasi. *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(1), 14–30. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.8282>
- Sumarto, W. D. (2022). *Sejarah Singkat Setengah Abad pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia & Universitas Gadjah Mada* (Pertama). Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Tantowi, A. & M. R. (2002). *Pendidikan Politik Ala Pesantren* (Pertama). Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP).
- Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Ruang Berkarya.
- Ubaedillah&Abdul Rozak. (2013). *Ubaedillah. (2003)*. (Kesepuluh). Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Ura, U., & Sudirgo, T. (2022). Pendidikan Dalam Pemikiran Ivan Illich Dan Henry Giroux. *Prosiding Seri Seminar Nasional*, 63, 65.
- Widodo, B., & Nurholis, E. (2019). Jl. PH.H. Mustofa No.23, Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40124. *Jurnal Artefak*, 6(2), 49–58.